

PERWAL NO.79, BD 2021/NO.82, 14 HLM.

MEKANISME PEMBAYARAN PENUNDAAN BELANJA DAERAH
2021

ABSTRAK : pada akhir tahun anggaran terdapat pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan, namun karena keterbatasan waktu proses pembayaran dan atau keterbatasan likuiditas keuangan daerah, belanja dimaksud belum dapat dibayarkan atau ditunda pembayarannya, sehingga perlu adanya Mekanisme Pembayaran Penundaan Belanja Daerah.

- Dasar Hukum:

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 ; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021.

- Peraturan Wali Kota ini terdiri dari beberapa BAB yaitu:

BAB I KETENTUAN UMUM

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

BAB III BELANJA YANG DITUNDA BAYAR

BAB IV PENGANGGARAN

BAB V PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN UTANG

BAB VI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

- Pasal 2 Peraturan Wali Kota ini mengatur maksud dan tujuan yaitu:

(1) Maksud ditetapkan Peraturan Wali Kota ini adalah untuk menjadi pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka penatausahaan jika terjadi penundaan pembayaran atas belanja daerah pada waktu tanggal pelaporan.

(2) Tujuan ditetapkan Peraturan Wali Kota ini adalah untuk tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah.

CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 24 Desember 2021.

- Lampiran : -